

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 15

Kompas	Kalteng Pos	Radar Sampit ✓
Palangka Post	Tabengan	

# APBD Gumamas 2022 Resmi Disetujui

**KUALA KURUN** – Empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), melalui penandatanganan persetujuan bersama kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, kemarin (17/11).

Empat buah raperda itu yakni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras. Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

"APBD tahun 2022 kami susun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022. Ini dalam rangka mewujudkan APBD yang tepat sasaran, sejalan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati," ucap Bupati Gumamas Jaya S Monong, Rabu (17/11).

Dijelaskannya, nantinya APBD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan

dan pengeluaran daerah.

Selanjutnya, mengenai Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras, diimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar dapat menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan pangan. Serta penyediaan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan wilayah.

Kemudian, dengan telah disetujui Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, diharapkan harus ada ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Kemudian Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, juga diharapkan dapat terwujud keseimbangan antara objek dan tarif retribusi persetujuan bangunan gedung, dengan pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi dan badan. Sehingga meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Dengan persetujuan empat buah raperda ini, akan dapat mensejahterakan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat," tandas Jaya S Monong. (arm/gus)